IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANDUNG

Tita Meirina Djuwita dan Dadang Hermawan

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: tdjuwita@gmail.com / hermawandadangs589@gmail.com

Abstrak

Kajian tentang peran pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan ormas dan mendeskripsikan pelaksanaan peran pengawasan Badan Kesbangpol terhadap ormas di Kabupaten Bandung dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di Kabupaten Bandung. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa harus diakui keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun kenyataan lainnya masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus didukung oleh peraturan daerah yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberdayaan yang harus dilakukan dengan lebih efektif; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.

Keywords: *authir guidelines; journal; template, manuscript (12pt italic)*

1. PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat (ormas) atau istilah lainnya *Non-Governmental Organization (NGO)* memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan ormas tersebut dari unsur pemerintah

Di Indonesia, keberlangsungan Ormas telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan keberadaan ormas telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh menteri yang menyatakan ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. “Daerah

sudah tidak bisa lagi. SKT hanya satu pintu yakni dari menteri”. Semua yang keluaran pusat,” kata Soedarmo saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin. Meskipun sudah tidak mengeluarkan SKT, daerah tetap memiliki peran penting dalam proses verifikasi pendaftaran. Pengawasan dilakukan secara hierarki karena tidak mungkin pusat dapat menjangkau ormas di seluruh wilayah Indonesia. “Kesbangpol yang mengawasi, termasuk kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar pasti terpantau,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan pemberian sanksi, tetap akan mengikuti apa yang telah diatur di UU Ormas yang baru. Dalam memberikan sanksi, daerah harus mengusulkan terlebih dahulu ke pusat. “Teguran dari sini atas laporan kesbangpol daerah. Ini sudah kita sosialisasikan di semua daerah,” kata Soedarmo.

Sebelumnya Budi Prasetyo, staf Khusus Mendagri, mengatakan pada prinsipnya pemerintah adalah satu yakni dari pusat sampai ke tataran kabupaten. Dia mengatakan pemberian sanksi oleh pemerintah daerah dimungkinkan tapi tidak asal-asalan. “Undang-undangnya memang menyerukan boleh memberikan sanksi, tapi terkoordinasi dengan Kemendagri. Tidak bisa bubarkan, tapi mendagri tidak tahu,”

katanya. Menurutnya, untuk memudahkan dalam pemberian sanksi ini akan dibuat sistem yang terintegrasi sehingga sanksi yang akan diberikan kepada ormas dapat dengan cepat terkoordinasi antara Kemendagri dan daerah. “Pembahasan soal sistem informasi satu bab sendiri di UU.

Jadi, Kemenkumham dan Kemenlu ke Kemendagri. Jadi satu data. Ini baru pembuatan sistemnya. Ini perintah UU,” jelasnya. Budi mengatakan SKT secara terpusat saat ini akan dikeluarkan oleh Kemendagri. Daerah hanya akan memberikan rekomendasi untuk nantinya Kemendagri yang menerbitkan SKT. Dalam memberikan SKT, jajaran Kemendagri di daerah akan memastikan keberadaan ormas tersebut. “Tentunya ada mekanisme yang harus dipenuhi jika mendaftar di Kemendagri. Ini mungkin yang membuat ormas yang terdaftar di Kemendagri lebih sedikit dibandingkan di Kemenkumham,” katanya.

Payung hukum tentang organisasi kemasyarakatan telah diperbaharui dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Dalam Undang –Undang yang baru, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas

anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif. Pencabutan status badan hukum ditegaskan Perppu Ormas bersifat langsung. Pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM terhadap ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. PERMASALAHAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian Ormas yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keberadaan Ormas yang semacam itu telah menciptakan kondisi seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga.

Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder, dapat ditemukan berbagai fakta mengenai realitas

permasalahan Ormas di Kabupaten Bandung, salah satu masalahnya yaitu tentang legalitas.

Dari sekitar 300 organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Bandung, ternyata hanya sekitar 80 ormas yang aktif mengadakan kegiatan dan membuat laporan rutin kepada Pemkab Bandung. Ormas-ormas yang tidak aktif tidak akan mendapatkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sehingga menjadi ormas ilegal.

Pemberdayaan ormas berdasarkan Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ormas. Pemberdayaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, berupa mendorong kebijakan/peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi. Untuk provinsi dan kabupaten, hal itu telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Sosial yang bersumber dari APBD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemda dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tata cara pemberian hibah dan sosial tersebut, tata cara penganggaran, pelaporan dan penatausahaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah. Pemberian hibah dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang asas keadilan, kepatuhan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar *aplikable* di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan

maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sasaran dan penetapan kebijakan umum pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bandung mengacu pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Pasal 40)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Sosial yang bersumber dari APBD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemda dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
4. Peraturan Bupati Bandung No.22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung No.06 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dimaksudkan agar terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Organisasi masyarakat yang mandiri, kuat, transparan dan akuntabel mutlak diperlukan dalam menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama ini orientasi ormas dan LSM yang jumlahnya 368 buah, lebih kepada kekuatan massa, tidak mengarah ke pemberdayaan anggota ormas.

Pentingnya pemberdayaan ormas di Kabupaten Bandung ini, terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut :

1. Selama ini fokus Ormas dan LSM lebih kepada kekuatan massa, tetapi kurang dalam pemberdayaan anggotanya,

sehingga anggota ormas tidak memiliki kemampuan positif dalam berorganisasi.

2. Banyak Sekali Ormas yang ada di Kabupaten Bandung Telah Berubah Domisili dan kepengurusan, tanpa melapor kepada Badan Kesbang setempat. Terbukti dari 368 Ormas terdaftar hanya 106 Ormas yang melakukan pelaporan.

3. Selama ini Organisasi Kemasyarakatan yang ada kurang memperhatikan laporan yang menjadi kewajibannya.

4. Banyak Oknum Organisasi Kemasyarakatan menyalahgunakan AD/ART serta bidang garapan.

5. Masih banyak anggota ormas yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hal ini mempermudah mereka dikendalikan oleh orang yang berduit memasukan pahamnya.

Menciptakan ormas yang mandiri dan berkualitas tidaklah semudah membalik telapak tangan, tetapi diperlukan koordinasi antar semua instansi terkait, domotori oleh Badan Kesbangpol selaku organisasi yang

diberikan kewenangan oleh pemerintah, dan instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri dan ormas itu sendiri.

3. FOKUS DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah, “implementasi kebijakan UU No.17 Tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung”. Adapun Sub fokus masalah adalah Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi dan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan fokus masalah dari penelitian ini, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung ?
Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung ?

4. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung
- b. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis konsep dari pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai implementasi kebijakan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung.

5. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan secara komperhensif, mendalam, dan alami mengenai implementasi kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. Metode deskriptif digunakan untuk melihat.

A. PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dye dalam Islamy (2002:20): “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Dye berpendapat sederhana bahwa

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam *Public Policy-Making* (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: “*Public policies are those policies developed by government bodies and official*”.

Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan dalam Diktat Kuliah Kebijakan Publik, (2006:31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun *public service* (jasa publik).

Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984:27-28) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: “*perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination*”.

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dalam Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan.

Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-Undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa: *”Policy implementation is the application by government’s administrative machinery to the problems”*.

Kemudian Edward III (1980:1) menjelaskan bahwa: *“policy implementation, is the stage of policy making between establishment of a policy...And the*

Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi

kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino (2006:154) bahwa: *“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented”*.

Agustino (2006:155) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu:

“Pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* dari Lester Stewart, (2000:108) dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach* (Lester Stewart, 2000:108). Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak

dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)”.

Bertolak belakang dengan pendekatan *top down*, pendekatan *bottom up* lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga

masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)
2. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)
3. *Resources* (sumber daya)
4. *Disposition* (sikap pelaksana)
5. *Communication* (komunikasi)

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penulis mengemukakan proposisi sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung akan dilakukan dengan baik melalui birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi.

2. Kurang tercapai implementasi kebijakan tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.
3. Implementasi kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bandung dengan upaya-upaya yang tepat akan menghasilkan pelaksanaan yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan :

1. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan UU No.17 Tahun 2013 di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa birokrasi dinilai baik, responden menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan regulasi pemberdayaan ormas di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung cukup mudah dan sederhana, begitupun pelayanan yang diberikan terhadap ormas cukup praktis. Adapun standar prosedur operasional yang diterapkan dalam pemberdayaan ormas cukup efisien.
2. Adapun untuk parameter *resources* (sumber daya) diukur melalui 3 parameter, yaitu 1) respon terhadap keinginan, 2) mengakomodir keinginan, dan 3) komitmen implementator. Artinya bahwa *resources* (sumber daya)

dalam implementasi kebijakan di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung dinilai baik. sesuai dengan hasil wawancara, responden menyatakan bahwa pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung sangat responsif terhadap keinginan dan keluhan ormas/LSM, pegawai sangat reaktif dalam memberikan layanan kepada ormas/masyarakat, komitmen implementator sangat dipegang teguh oleh pegawai Badan Kesbangpol.

3. Sedangkan parameter disposisi atau sikap pelaksana diukur melalui 3 parameter, yaitu 1) Kemampuan pelaksana, 2) Pendidikan para pelaksana, dan 3) Keahlian yang dimiliki. termasuk pada kategori baik. Artinya bahwa *disposition* (sikap pelaksana) dalam implementasi kebijakan di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung menunjukkan dinilai baik. sesuai dengan hasil wawancara responden menyatakan bahwa pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung mampu memahami dan menginterpretasikan substansi kebijakan dalam melaksanakan program. Selain itu pendidikan para pegawai sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan sejauh ini keahlian para pegawai sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sedangkan parameter komunikasi diukur melalui 3 parameter, yaitu 1) proses sosialisasi kebijakan, 2) media sosialisasi kegiatan dan 3) konsistensi dalam pelaksanaan. Artinya bahwa *communication* (komunikasi) dalam implementasi kebijakan di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung dinilai baik. sesuai dengan hasil wawancara, responden menyatakan bahwa sosialisasi kebijakan tentang pemberdayaan ormas sudah berjalan optimal. Selain itu media sosialisasi yang digunakan dalam rangka persiapan pelaksanaan kebijakan ormas sudah menggunakan media cetak dan elektronik, dan konsistensi dalam pelaksanaan pemberdayaan sudah merupakan hal yang normative.

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Koordinasi Eksternal sebagai Determinan terhadap Pemberdayaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung. terdapat beberapa temuan hasil penelitian sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Kebijakan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya pemberdayaan ormas yang optimal di Kabupaten Bandung. Tidak terlepas dari hal itu, implementasi kebijakan atau lebih dikenal dengan pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan secara maksimal diiringi dengan pelaksanaan koordinasi eksternal yang maksimal karena pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh Badan Kesbangpol secara internal, tetapi melibatkan semua ormas yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan demikian Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung harus melakukan kerjasama yang baik dengan semua ormas di Kabupaten Bandung.

Implementasi kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dimaksudkan agar terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa dengan orrganisasi masyarakat yang mandiri, kuat, transparan dan akuntabel mutlak diperlukan dalam menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai

tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun pada kenyataannya selama ini orientasi ormas dan LSM yang jumlahnya 368 buah, lebih kepada kekuatan massa, tidak mengarah ke pemberdayaan anggota ormas. Pentingnya pemberdayaan ormas yang optimal di Kabupaten Bandung dikarenakan terlihat adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Selama ini fokus Ormas dan LSM lebih kepada kekuatan massa, tetapi kurang dalam pemberdayaan anggotanya, sehingga anggota ormas tidak memiliki kemampuan positif dalam berorganisasi.
2. Banyak Sekali Ormas yang ada di Kabupaten Bandung Telah Berubah Domisili dan kepengurusan, tanpa melapor kepada Badan Kesbang setempat. Terbukti dari 368 Ormas terdaftar hanya 106 Ormas yang melakukan pelaporan.
3. Selama ini Organisasi Kemasyarakatan yang ada kurang memperhatikan laporan yang menjadi kewajibannya.

4. Banyak Oknum Organisasi Kemasyarakatan menyalahgunakan AD/ART serta bidang garapan.
5. Masih banyak anggota ormas yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hal ini mempermudah mereka dikendalikan oleh orang yang berduit memasukan pahamnya.

Menciptakan ormas yang mandiri dan berkualitas tidaklah semudah membalik telapak tangan, tetapi diperlukan koordinasi antar semua instansi terkait, domotori oleh Badan Kesbangpol selaku organisasi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, dan instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri dan ormas itu sendiri.

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi juga diartikan proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya pemberdayaan maupun produktivitas ormas dan LSM tersebut disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini

terlihat dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi, antara Ormas dan Badan Kesbangpol, Contoh; banyak Ormas tidak melaporkan kegitannya, komunikasi antar institusi terhadap perkembangan dan situasi, sangat rendah.
2. Kurang optimalnya pelaksanaan silaturahmi ormas, LSM, dan paguyuban kedaerahan dengan pemkab Bandung. Contoh ; Banyak Ormas yang tidak memperhatikan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan bela Negara. Contoh ; belakangan banyak ormas yang terkotak-kotak oleh paham terkait SARA Masih banyak ormas yang masih belum mengerti tentang sistem dan budaya politik yang demokratis serta pemahaman supra dan infra struktur politik di daerah.

B. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas sangatlah jelas pentingnya peranan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Pengawasan efektif tentunya harus dilakukan oleh lembaga yang berhubungan langsung dengan keberadaan

ormas, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung.

Untuk dasar hukum pelaksanaan pengawasan terhadap ormas di daerah, perlu diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang pengawasan ormas oleh Kesbangpol.

Jika dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan oleh ormas, maka pemerintah perlu memberikan tindakan tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Kesbangpol harus dapat mengantisipasi keberadaan ormas yang anti Pancasila sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat sesuai aturan yang berlaku.

Hal-hal yang perlu di atur dalam pengawasan ormas adalah : a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki lembaga pengawas internal maupun eksternal.

Daftar Pustaka

ABDURRAHMAN, O.

1990. Dasar-dasar Public Relations. : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

AGUSTINO, Leo.

2006 Dasar-Dasar Kebijakan Publik.: CV. Alfabeta, Bandung

ANDERSON, J,

1978, Public Policy-Making, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan 12, Bumi Aksara:2003, Jakarta.

BRANTAS,

2009 Dasar-dasar Manajemen, Penerbit Alfabeta. Bandung:

BADUDU, J. S, Sutan Mohammad Zain,

2001 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

DARYANTO dan Abdullah.

2013 Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi, Prestasi Pustakarya,

Jakarta.

- EDWARDS, George C., III
 1980 The Policy Predicament,: W.H. Freeman San Francisco.
- EFFENDI Sofyan,
 1995 Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
- HANDAYANINGRAT, Suwarno,
 2000 Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. : CV. Haji Masagung, Jakarta.
- GIE, The Liang,
 1992 Administrasi Perkantoran Modern, Edisi Keempat, Penerbit Liberti bersama dengan Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi Yogyakarta
- GRINDLE, Merilee S.
 1980 Politics and Policy Implementation in The Third World.: Princeton University Press, New Jersey
- HANDOKO, T. Hani,
 2009 Manajemen. Cetakan Dua Puluh, Penerbit BPPE, Yogyakarta